



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**RENSTRA 2024-2026
PERUBAHAN**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESABUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
 - b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024- 2026;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 13
Juni 2023
BUPATI BANGKA,
Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGIAN HUKUM

SRI ELLY FITRI, SH

PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 24

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD yang wajib dimiliki dan memiliki peran penting sebagai pedoman bagi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka beserta seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi untuk mewujudkan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Isi Renstra ini mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, serta memperhatikan aturan terkait.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 ini disusun, Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis ini masih belum sempurna. Segala komentar, saran, kritik maupun tanggapan demi penyempurnaan Rencana Strategis ini sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : 10 April 2023


**Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka,**
**MOHD NURSI, S.IP
PEMBINA TK I/ IV B
NIP. 19680602 198810 1 1001**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	33
2.5 Mitra Perangkat Daerah	34
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD	34
2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2 Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	46
4.1.a Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	46
4.1.b Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah	53
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui IKU	46
7.2 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui IKK	46
BAB VIII PENUTUP	91

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka periode 2019-2023. Kabupaten Bangka merupakan salah satu Daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala Daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di akhir Tahun 2023 sampai terlaksananya Pemilihan Pemilukada Serentak 2024 akan ada kekosongan pimpinan kepala Daerah di Kabupaten Bangka.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi Daerah yang tidak memiliki kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Bupati menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.

Mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Maka Dokumen Perencanaan yang pertama kali wajib disusun dan dimiliki oleh Perangkat Daerah adalah Renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 adalah Dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk merangkum dan mensinergikan perencanaan kinerja yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dalam periode waktu 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memiliki fungsi sebagai alat ukur dan acuan bagi perangkat daerah di dalam melaksanakan kinerja pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Keberhasilan atau tidaknya program kinerja pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat daerah dapat diukur dengan membandingkan realisasi kinerja yang ada terhadap target- yang telah ditetapkan di dalam indicator kinerja pembangunan yang terdapat di Renstra Perangkat Daerah.

Oleh karena itu Setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Dokumen Renstra untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan.

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjelaskan bahwa Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain. Oleh karena itu Dokumen Renstra haruslah memiliki keterkaitan dengan RPJPD Kabupaten Bangka, RPD Kabupaten Bangka, Renstra Kementrian Lembaga (KL) dan Renstra Provinsi. Sehingga dalam proses penyusunannya Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait.

Rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Renstra Badan Kesbangpol juga focus terhadap isu – isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi dan serta membantu di dalam mengambil keputusan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan strategi tersebut. Rencana strategis membantu mengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Isi yang terkandung di dalam Renstra Badan Kesbangpol harus mencakup Kebijakan, Startegi dan Program Pembangunan dan termasuk ke dalam lingkup tupoksi Badan Kesbangpol. Fungsi Renstra Badan Kesbangpol adalah untuk mensinergikan Sumber daya dan potensi yang dimiiki oleh Badan Kesbangpol terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu

dalam penyusunan dokumen Renstra harus memperhatikan keterkaitan antara sasaran yang ada di RPD dengan sasaran kinerja dan perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan.

Selain itu juga Renstra Badan Kesbangpol memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja memiliki korelasi dengan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Bangka Belitung dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI. Hal ini bertujuan agar penyusunan Program- program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangka dapat selaras dengan program-program Kesatuan Bangsa dan politik di Tingkatan Provinsi dan Pusat.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka;
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Bankesbangpol Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Bankesbangpol dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah
- 2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD
- 2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Startegi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2024-2026

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagunya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII memuat :

- 7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama
- 7.2 Penentuan Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK)

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merupakan salah satu Perangkat daerah (Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berikut ini disajikan data primer sebagai gambaran yang telah dilaksanakan :

No	Uraian	Satuan	Data Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Forum Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka	Forum	FKUB, FPK, FKDM	FKUB, FPK, FKDM	FKUB, FPK, FKDM	FKUB, FPK, FKDM	FKUB, FPK, FKDM, FORKOP IMDA	FKUB, FPK, FKDM, FORKOPI MDA
2.	Organisasi Masyarakat (aktif)	Organisasi	22	23	35	49	61	71
3.	Pemilihan Umum (Pilkada Kepala Daerah/Bupati / Wakil Bupati)	%	-	62,22 %	-	-	-	-
	Pemilihan Umum (Pilpres, Pileg (DPRD II, DPRD I, DPRD, DPD).	%	-	81,35%	-	-	-	-
	Pemilihan Umum (Pilkada Bupati)	%	-	62,22 %	-	-	-	-
4.	Partai Politik.	Parpol	-	17	17	17	22	26
5.	Demonstrasi	Aksi	-	-	-	-	-	-
6.	Konflik	Konflik	-	-	-	-	-	11
7.	Izin Penelitian	Dokumen	38	38	51	39	63	57

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2021 tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D). Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemerintahan yang melaksanakan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Bangka.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama,ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

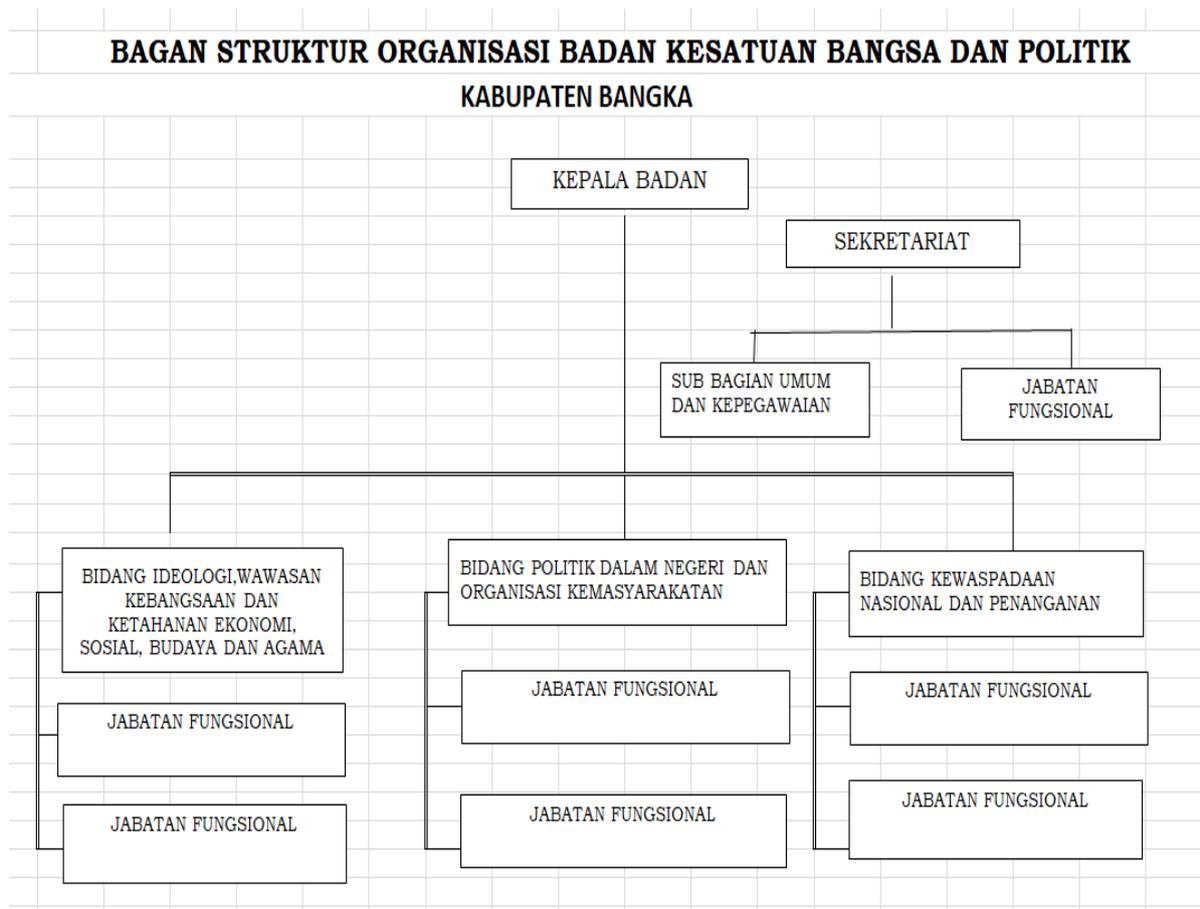
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari;
 - 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik yang terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional dan
 - 2. Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan Badan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Penyelenggaraan koordinasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Penyelenggaraan pementauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Penyelenggaran forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. Penyelenggaran administrasi Badan; dan
- g. Penyelenggaran fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris Badan bertugas memberikan pelayananan administratif di lingkungan Badan Kesbangpol. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaran dan pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;

- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Jabatan Fungsional

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan.
- b. melaksanakan hubungan masyarakat dan protocol.
- c. mengelola penggunaan perlengkapan, rumah tangga dan asset.
- d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

2) Jabatan Fungsional

Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Dan Daerah bertugas:

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
- c. Penyusunan laporan kinerja.
- d. Melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi

- politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (ormas), evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan (ormas), pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) asing di wilayah Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya aparatur per 1 April 2023 berjumlah 33 Orang terdiri dari 18 orang PNS dan 15 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah dan komposisi pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, maka PNS pada Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Menurut Eselon

No.	Eselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1.	II	-				1	
2.	III	1	-	2	1	4	
3.	IV	-	1	-	-	1	
	Jumlah	1	1	2	1	6	

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			PHL			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Sekretariat.	1	3	4	3	7	10	14
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	5	1	6	-	2	2	8
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	4	1	5	1	-	1	6
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	2	3	1	1	2	5
	Jumlah	13	7	20	4	7	11	33

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2	1	3
2.	S1	6	4	10
3.	D3	-	2	2
4.	SLTA	3	-	3

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Golongan

NO	Golongan	A	B	C	D	JUMLAH
1	I	-	-	-	-	-
2	II	-	-	1	2	3
3	III	2	1	4	3	10
4	IV	4	1	-	-	5
	Jumlah					18

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jabatan

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Struktural	3	2	5
2.	Jabatan Fungsional	4	3	7
3.	Tenaga Teknis Lainnya	-	-	-
4.	Arsiparis	-	-	-
5.	Staf/Administrasi/tata Usaha	4	2	6
	Jumlah	11	7	18

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	-	-	-
2.	S1	1	4	5
3.	D3	-	1	1
4.	SLTA	4	5	9

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Kantor yang dimiliki Badan Kesbangpol dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka

No	Nama Aset/Sarana Prasarana	Kondisi (B/KB/RB)	Nilai
1	Tanah	B	330.336.000
2	Gedung dan Bangunan	B	801.285.000
3	Bangunan Tempat Tinggal	B	-
4	Kendaraan	B	381.349.200
5	Alat-alat kantor/rumah tangga	B	178.532.000
6	Alat studio dan komunikasi	B	29.300.000
7	Komputer	B	119.590.000
8	Aset tetap Renovasi (ATR)	B	40.666.000
9	BMD Ekstrakomptabel	B	473.000
JUMLAH			1.881.058.200,00

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 6.882 M² yang merupakan tanah bangunan gedung.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari dua unit dengan luas 258 M² yang terletak di Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka.

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Januari 2022 sebanyak 7 unit yang terdiri dari 2 unit kendaraan roda empat minibus serta 5 unit kendaraan roda dua.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Adapun beberapa layanan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yaitu :

a. Pelayanan Internal

1. Pelayanan Program Badan;
2. Pelaksanaan Inventarisasi, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data Badan;
3. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Program Badan;
4. Penyusunan Laporan Badan;
5. Penyusunan Perbendaharaan Keuangan Badan;
6. Pelaksanaan Akutansi keuangan Badan;
7. Pelaksanaan Verifikasi anggaran Badan;
8. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran badan;
9. Pengelolaan kearsipan;
10. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;

11. Pengelolaan data Kepegawaian Badan;
 12. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- b. Pelayanan Eksternal
1. Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
 2. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas;
 3. Fasilitasi terhadap kegiatan Inteligen Daerah;
 4. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
 5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama;
 6. Fasilitasi Layanan Organisasi Masyarakat;
 7. Fasiliatasi Tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
 8. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 9. Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
 10. Fasilitasi Pemantauan Perkembangan Politik Kabupaten Bangka;

Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan pelayanan yang telah diberikan, perlu suatu tolok ukur keberhasilan kinerja pelayanan yang terukur dan mampu merepresentasikan keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Adapun capaian kinerja dan

realisasi anggaran Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2019-2022 adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kesbangpol
Kabupaten Bangka 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGE T IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNY A	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20
1	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	70,50%				70,10	70,10	70,30	70,50	70	70,10	71,51	71,51%	-	100%	100%	103%	102%	-
2	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	90%			100%	100%	80%	85%	90%	70%	70%	50%	66,67%	-	100%	70%	63%	78,43%	-
3	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	70%			100%	55%	60%	65%	70%	100%	55%	60%	65%	-	100%	100%	100%	100%	-

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Program/Sub Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Kesbangpol
Kabupaten Bangka 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20
1	Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%		70%	75%	80%	90%	100%	70%	0	0	0		100%	0	0	0	
	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%		70%	75%	80%	90%	100%	70%	0	0	0		100%	0	0	0	
2	Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya		100%		100%	100%	80%	90%	100%	100%	80%	0	90%		100%	100%	0	100%	
	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		100%		100%	100%	80%	90%	100%	100%	80%	0	90%		100%	100%	0	100%	
3	Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial		100%		100%	100%	80%	90%	100%	100%	0	100%	90%		100%	0	100%	100%	
	Persentase pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100%		100%	100%	80%	90%	100%	100%	0	100%	90%		100%	0	100%	100%	
4	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat		70%		100%	60%	60%	65%	70%	100%	50%	62,5%	65%		100%	85%	62,5%	100%	
	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat		100%		100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%		100%	30	50%	60%	70%	100%	21	100%	60%		100%	70%	25%	100%	

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran dan realisasi menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan (Tabel 2.6) dan Dalam Tabel 2.7 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2019-2023.

Dari data yang tersaji (Tabel 2.6), menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka berada pada kondisi yang kurang baik, jika memperhatikan realisasi indikator kinerja dan penggunaan anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pada periode 2019 - 2023, masih banyak target yang belum optimal pada Indikator Persentase Cakupan wawasan Kebangsaan dengan target 80 - 100% belum mencapai target yaitu pada tahun 2020-2021 70% dan 63 % di karenakan Refocussing Anggaran sehingga adanya Pengalihan anggaran dalam mengatasi Pandemi Covid 19, sedangkan Indikator Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat dari target 55%-70% dan telah mencapai target yang direncanakan dan Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol pada tahun 2021 dengan target B 70,10 melebihi target yang direncanakan yaitu BB 71,56.

Pada Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Periode 2019-2023 telah ditetapkan 3 Sasaran strategis yaitu Pertama Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dengan Indikator Kinerja Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan. Indikator ini mencapai target di tahun pertama Renstra 2019 sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi dan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mengatasi Pandemi Covid 19. Efisiensi Anggaran tersebut berimplikasi

hambatan Badan Kesbangpol didalam pencapaian target Kinerja. Sedangkan untuk tahun 2022 mengalami Peningkatan dari 68% menjadi 78,43% walupun masih ada satu sub kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan Ketidakmampuan PPTK dalam melaksanakan kegiatan tersebut serta telah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi tersebut yaitu dengan Penggantian PPTK serta melakukan Pengalihan Anggaran ke Sub Kegiatan lain tetapi tidak disetujui oleh PPTK yang bersangkutan dengan alasan mau melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi sampai masa akhir Desember 2022 tidak juga dilaksanakan dengan alasan tidak mau menandatangani Pencairan tersebut dan hampir memasuki masa Pensiun. Untuk mencapai Indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bankesbangpol Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Indikator Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 0%, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Indikator Persentase Cakupan Ketahanan Sosial dan Budaya dengan capaian target 2021 0% sehingga juga belum mencapai target yang direncanakan sedangkam untuk tahun 2022 sudah mencapai target yaitu dengan capaian 100%. dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan Indikator Persentase Cakupan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Capaian tahun 2020 0 % belum mencapai target yang direncanakan sedangkan untuk tahun 2019 dan 2021 telah mencapai target 80% dan 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 sudah mencapai target dengan capaian 100%. Penyebab belum tercapainya Indikator tersebut yaitu Perubahan Struktur anggaran pada tahun 2019-2021 sedangkan perbaikan Indikator ini mulai dilakukan pada periode akhir renstra yaitu 2022 dan 2023.

Sasaran Strategis Kedua Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Cakupan Politik dan Organisasi

Masyarakat dengan target Renstra 55% s.d 100%. Untuk mencapai Indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bankesbangpol Kabupaten Bangka melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan Indikator Persentase Cakupan Pendidikan Politik dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat dengan Indikator Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara Keseluruhan pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka periode 2019-2022 yang sudah berlangsung selama 4 tahun dapat dikatakan pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol berlangsung dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu adanya koordinasi dan sinergitas yang baik diantara stakeholder dan mitra terkait penanganan kerawanan sosial di Kabupaten Bangka.

Keberhasilan Badan Kesbangpol didalam meredakan Konflik tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini daerah rawan Konflik dan Pemantauan Ketertiban Masyarakat. Deteksi dini dan pemantauan ketertiban masyarakat merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan sosial di Kabupaten Bangka.

Namun, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa hambatan yaitu

1. Perubahan Struktur Anggaran pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Proses Perubahan Anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka tidak menempatkan Badan Kesbangpol sebagai Perangkat daerah yang memiliki prioritas utama.

2. Sampai saat ini pola pelaporan deteksi dini Konflik dan Pemantauan Orang asing di Kabupaten Bangka belum tertata dengan baik.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangka

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA - RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,419,000.00	379,175,800	3,532,452,477.00	4,052,927,945.00	4,183,793,367.00	428,748,417	366,810,667.00	2,778,926,733.00	2,950,328,490	-	86.37	96.74	78.67	72,79	-		
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	25,416,500.00	2,733,700	5,766,600.00	30,000,000.00	1.165.500.000.00	25,021,400	2,733,700.00	5,756,100.00	2.250.000.00	-	98.45	100.00	99.82	7,50	-		
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	61,200,000.00	8,010,000	963,336,933.00	972,989,783.00	4.023.089.,213.00	59,365,143	7,849,600.00	963,336,933.00	972.365.083,00	-	97.00	98.00	100	99,94			
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	13,282,000.00	-	6,063,000.00	10,000,000.00	15.000.000.00	11,676,000	0	6,063,000.00	-9.741.000,00	-	87.91	0.00	100	97,41			
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	75,000,000.00	26,663,000	151,990,000.00	83,080,000.00	214.000.000.00	74,567,000	26,206,000.00	151,930,000.00	181.076.900,00	-	99.42	98.29	99.96	98,91			
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	98,371,500.00	4,745,750	48,960,200.00	63,531,000.00	158.650.700.00	3,993,473	4,745,000.00	6,537,400.00	62.132.410,00	-	97.79	99.98	95.05	97,80			

Berdasarkan Tabel 2.7 Anggaran Badan Kesbangpol pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan anggaran disebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan Refocussing Anggaran untuk mengatasi Pandemi Covid 19. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar Rp. 4.023.089.213,- dikarenakan adanya Persiapan Pemilukada 2024, Pemantauan Persiapan Pemilukada 2024 dan Bantuan Keuangan Partai Politik. Selanjutnya pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik juga mengalami kenaikan di tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 1.165.500.000,00 di karenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang dialihkan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Selanjutnya dalam Pencapaian kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi Kelompok Sasaran Layanan yang dilakukan Badan Kesbangpol dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yaitu

1. Partai Politik yang mendapatkan Kursi dan Suara dalam Pemilu dan Pemilukada serta Masyarakat yang melakukan Pendaftaran partai Politik
2. Pengawasan terhadap Organisasi Masyarakat yang aktif dan terdaftar serta Pendaftaran Ormas yang baru serta Pelayanan Ormas yang masa SKT nya sudah berakhir.
3. Layanan dalam pembuatan Izin Penelitian bagi Mahasiswa.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa mitra yang senantiasa bekerjasama. Mitra-mitra pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu

NO	URUSAN	MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN	BENTUK KEMITRAAN
1.	PEMERINTAHAN UMUM	Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim	Koordinasi Penyelenggaraan dalam Urusan Pemerintahan Umum melalui Forkopimda
		KPU, Bawaslu	Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu
		Kementrian Agama	Koordinasi Penyelenggaraan FKUB
		Imigrasi	Koordinasi Pengawasan Warga Negera Asing
		BNN	Koordinasi penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Badan Kesbangpol dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan tidak adanya Dukungan dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

2.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah

Untuk saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik sudah melakukan kerjasama Daerah dan sudah ada MOU dari Pemerintah Kabupaten Bangka dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) tanggal 01 Juli 2022 dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Bangka. Selain itu Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka juga sudah ada pembicaraan untuk melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan PT. Timah.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisa terhadap permasalahan dan isu-isu strategis dapat menjadi dasar untuk menentukan kinerja tiga tahun kedepan. Dalam bab ini akan disajikan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis perangkat daerah. Untuk memahami permasalahan pembangunan dan isu strategis 2024-2026 digunakan pendekatan model integratif menghubungkan beberapa dokumen perencanaan perangkat daerah dan pemerintah daerah.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati /Walikota Kota di wilayah kerja masing-masing menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dimaksud Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati /Walikota bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.

Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud, meliputi :

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia.
2. Pembinaan Persatuan dan Keatuan Bangsa
3. Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan.
4. Penangan Konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
5. Pengembangan Kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan
6. Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertical.

Dengan demikian pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka pada hakekatnya adalah pembangunan di semua bidang atau sektor. Namun sebagaimana daerah lain pada umumnya, Kabupaten Bangka juga memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, alam, teknologi, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam implementasinya perlu dilakukan prioritas pembangunan, sektor atau bidang mana yang akan didahulukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

- penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
 - e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesatuan bangsa dan politik yang menjadi tugas, tanggungjawab dan wewenangnya. Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang diidentifikasi tersebut menjadi dasar pemikiran ditetapkannya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun identifikasi masalah-masalah tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
(1)	(2)	(3)		(5)	
1	Menurunnya Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1	Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di Masyarakat	1	Menghilangnya rasa cinta tanah air serta nilai-nilai budaya bangsa khususnya dikalangan para generasi muda
		2	Rendahnya pemahaman tujuan 4 Pilar Wawasan Kebangsaan di kalangan generasi muda	2	Belum optimalnya Pembinaan 4 pilar Wawasan Kebangsaan
2	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam demokrasi	1	Kurangnya Pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi	1	Belum optimalnya pembinaan pendidikan politik bagi masyarakat atau Pemilih Pemula
3	Kondisi Keamanan dan Ketertiban	1	Penambangan Ilegal terjadinya Konflik Perebutan Kepemilikan Lahan Penambangan dan Rusaknya Sumber Daya Alam dan Lingkungan	1.	Kurangnya Penegasan dari Aparat terkait tentang aturan Penambangan
4	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	1	Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Para Generasi Muda mengenai Bahaya Narkotika	1	Belum Optimalnya Sosialisasi P4GN bagi Generasi Muda
5	Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal	1	Jumlah Sarana dan Prasarana yang belum memadai, Sumber daya manusia yang belum optimal baik dari kualitas maupun kuantitas	1. 2. 3.	- Belum Optimalnya pelayanan administrasi perkantoran - Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dalam pelaksanaannya Pemasalahan Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2022 sangat dipengaruhi oleh kondisi internal perangkat daerah. Diantara kondisi internal yang dapat berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan dan Manajemen Pemerintahan.
2. Dukungan SDM yang masih terbatas dalam menangani masalah tertentu.
3. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
5. Kerjasama (*networks*) antar perangkat daerah, organisasi politik dan masyarakat, serta mitra Aparatur Penegakan Hukum lainnya yang belum optimal.

Selain kondisi internal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi permasalahan di luar kewenangannya, yang bagaimanapun juga dapat mempengaruhi hasil pencapaian Pelayanan. Diantara permasalahan tersebut adalah meningkatnya jumlah pendatang dan WNA yang bekerja di wilayah Kabupaten Bangka. Masalah Pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Bangka semenjak tahun 2019 sampai tahun 2021 yang berakibat pada tatanan hidup masyarakat serta menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berakibat hilangnya lapangan pekerjaan, PHK, daya beli masyarakat dan lainnya, yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat, yang sampai sekarang masih berdampak dan belum terjadinya pemulihan ekonomi masyarakat yang signifikan. Hal ini menuntut perencanaan yang strategis agar tugas, fungsi dan wewenang dapat dilaksanakan dengan baik dalam dua tahun kedepan.

Untuk lebih detilnya, penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi Berdasarkan Capaian Kinerja 2019-2022, serta faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, dijabarkan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu Ideologi dan Kebangsaan 2. Kondisi Politik dan Demokrasi. 3. Kondisi Keamanan dan Ketertiban 4. Isu Konflik dan Toleransi 	Kondisi sosial dan politik yang aman dan stabil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dukungan anggaran. 2. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan Wawasan Kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat. 3. Ketersediaan jumlah staf pelaksana kegiatan yang memadai. 4. Ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi dan kebutuhan. 5. Penguatan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 6. Penerapan SOP Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 7. Kurangnya Kompetensi dan Pemahaman akan tupoksi dari para 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya peningkatan penduduk pendatang yang mencari pekerjaan dengan beragam latar belakang sosial ekonomi. 2. Terjadinya peningkatan jumlah WNA yang bekerja dan berdomisili di Kabupaten Bangka. 3. Semakin meningkatnya aktifitas penambangan timah di wilayah darat dan laut. 4. Semakin tingginya penyebaran berita HOAX dari berbagai media. 5. Semakin kompleksnya kebutuhan penguatan kesadaran politik dan partisipasi warga dalam proses kebijakan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin rentannya gesekan antar penduduk asli dan pendatang sebagai akibat dari semakin meningkatnya kemajemukan penduduk tanpa diiringi dengan pembauran sosial. 2. Meningkatnya kekhawatiran terhadap WNA 3. Deteksi dini terhadap aktifitas masyarakat yang berpotensi konflik. 4. Pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. 5. Perlunya penguatan partisipasi politik warga secara aktif baik dalam pemilu, pemilukada, pilkades, maupun dalam pengambilan keputusan sehari-hari. 6. Pembinaan pendidikan politik bagi organisasi politik, pemuda dan pelajar.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			aparatur.	6. Semakin kompleksnya konstelasi politik, baik di level lokal maupun level nasional.	
Gambaran Kondisi Internal Saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaya Kepemimpinan dan Manajemen Pemerintahan 2. Dukungan SDM yang masih terbatas dalam menangani masalah tertentu. 3. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. 4. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan 5. Kerjasama (<i>networks</i>) antar perangkat daerah, organisasi politik dan masyarakat, serta mitra Aparatur Penegakan Hukum lainnya yang belum optimal. 	Peningkatan Kualitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dukungan anggaran. 2. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan Wawasan Kebangsaan dan kesadaran politik masyarakat. 3. Ketersediaan jumlah staf pelaksana kegiatan yang memadai. 4. Ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi dan kebutuhan. 5. Penguatan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 6. Penerapan SOP Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi sosial yang fokus pada bidang kesatuan bangsa 2. Jumlah forum lintas agama yang fokus pada penguatan kesatuan bangsa 3. Jumlah lembaga masyarakat yang fokus pada bidang kesatuan bangsa 4. Jumlah forum lintas agama, organisasi masyarakat dan lembaga penelitian yang aktif dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka. 5. Jaringan kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah staf pelaksana kegiatan 2. Kualitas staf pelaksana kegiatan yang masih perlu ditingkatkan. 3. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja yang perlu ditingkatkan. 4. Pendataan organisasi masyarakat, forum lintas agama dan lembaga penelitian yang fokus pada bidang kesatuan bangsa yang perlu diperbarui. 5. Komunikasi dengan organisasi masyarakat, forum lintas agama dan lembaga penelitian yang fokus pada bidang kesatuan bangsa yang perlu ditingkatkan. 6. Kerjasama dengan organisasi masyarakat, forum lintas agama, dan lembaga penelitian yang fokus pada kesatuan bangsa yang perlu diperkuat.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kabupaten Bangka dengan organisasi masyarakat, lembaga penelitian dan forum keagamaan yang fokus pada bidang kesatuan bangsa dan Politik	

1.2 Isu Strategis

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Bangka. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Dinamika yang berkembang pada saat terakhir menunjukkan adanya potensi resistensi terhadap pengelolaan sumber daya alam daerah yang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rencana kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang sampai saat ini masih menjadi polemik yang cukup hangat. Perbedaan kepentingan yang terjadi bukan hanya secara vertikal yang melibatkan antara masyarakat dan pemerintah, namun juga secara horizontal yang melibatkan antara kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan kelompok masyarakat yang setuju. Apabila tidak dikelola dengan baik maka perbedaan kepentingan ini akan menjadi bersifat terbuka dan dikhawatirkan apabila ini terjadi dampaknya akan dapat mengganggu jalannya pembangunan. Disamping persoalan diatas , kondisi kemiskinan

kemungkinan juga akan menjadi faktor bagi munculnya tindak kriminal dan kejahatan yang dampaknya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Disamping masalah diatas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Analisis Gambaran Pelayanan OPD, Kajian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dapat dirumuskan isu - isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasar hasil evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja Renstra PD tahun sebelumnya. Sesuai dengan uraian masalah yang terjadi Kabupaten Bangka, maka dapat dirumuskan isu-isu yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja SKPD yaitu :

1. Isu Ideologi dan Kebangsaan yang terdiri dari :
 - a. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di semua elemen Masyarakat
 - b. Rendahnya pemahaman tujuan 4 Pilar Wawasan Kebangsaan di kalangan generasi muda
 - c. Rendahnya rasa nasionalisme dan kebangsaan para generasi muda yang disebabkan derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing sehingga telah merubah mental, sikap dan prilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan.
 - d. Masih kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kebudayaan daerah dan seni budaya daerah

- e. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Para Generasi Muda mengenai Bahaya Narkotika
 - f. Masuknya Budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya degradasi moral dan budaya di masyarakat.
2. Isu Kondisi Politik dan Demokrasi yaitu
- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
 - b. Kurangnya Pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi
 - c. Masih kurangnya masyarakat yang memahami kebijakan politik
 - d. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
 - e. Masih adanya ormas dan LSM yang belum terdata
3. Isu Kondisi Keamanan dan ketertiban yaitu
- a. Penambangan Ilegal terjadinya Konflik Perebutan Kepemilikan Lahan Penambangan dan Rusaknya Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
 - b. Maraknya Penggunaan Media Informasi dalam Penyebaran berita Hoax di masyarakat yang dapat menimbulkan keamanatan dan keresahan di masyarakat.
4. Isu Konflik dan Toleransi
- Masih adanya penolakan pendirian rumah ibadah yang dapat mengarah pada isu-isu intoleransi beragama, maupun sentiment agama yang dapat mengarah pada konflik sosial serta berkembangnya radikalisme di kalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil Identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, telaahan terhadap Renstra Kemendagri, dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa dan politik yang bisa diidentifikasi sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dan deteksi dini potensi konflik social yang muncul di masyarakat
2. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat
3. Pemantauan, pendataan dan pembinaan orang asing/WNA.
4. Pengawasan dan pembinaan organisasi masyarakat.
5. Peningkatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).
6. Penguatan Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
7. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkotika (P4GN).
8. Optimalisasi Peran dan Fungsi lembaga demokrasi.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah yang dituju. Sedangkan sasaran disusun guna memperjelas pencapaian tujuan yang ingin diraih.

Tujuan dan sasaran pembangunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026. Dengan menggunakan Penyelarasan ditetapkan tujuan dalam RPD Kabupaten Bangka selama 2024-2026. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka mendukung untuk pencapaian tujuan "Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum" dan Tujuan RPD yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi diintervensi dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat” yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat.
2. Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja Pemerintah Daerah serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.

Untuk itu, untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah yang harus didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi yang akan di wujudkan melalui sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat.

4.1.a. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesbangpol dan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026

Tujuan merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk

melakukan perubahan kearah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan penjelasan atas keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD di atas dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dengan mempertimbangkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis yang ada, maka tujuan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ingin diwujudkan pada tahun 2024-2026 adalah: **“Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum”**. Tujuan ini dirumuskan, erat kaitannya dengan dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai indikator Sasaran Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mengukur ketercapaian dari tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada akhir periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, dapat diukur melalui indikator tujuan yaitu, Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Nilai Perencanaan Kinerja dalam Lakip dan predikat capaian kinerja hasil perencanaan pembangunan dengan kategori tinggi.

Sasaran Renstra Badan Kesbangpol dan RPD 2024-2026

Untuk menerjemahkan keberhasilan capaian tujuan pembangunan di atas secara tahunan, maka dirumuskan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat
2. Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol

Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan dan Sasaran RPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dimulai dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPD Kabupaten Bangka.

Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan, sinkronisasi dan sinergisitas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki kaitan substantif dengan visi dan misi RPD Kabupaten Bangka sekaligus Renstra Kementerian/ Lembaga serta Renstra Provinsi. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga hubungan RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran Perangkat Daerah.

Program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana dijabarkan pada lampiran Renstra ini.

Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
dan Tujuan , Sasaran dan Target Renstra Badan Kesbangpol
Tahun 2024-2026

No	Tujuan RPD	Indikator Tujuan RPD	Sasaran RPD	Indikator Sasaran RPD	Target RPD		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	30%	31%	32%
No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Target Renstra		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban umum			100%	100%	100%
			Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	80%	75%	70%
			Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	70%	70%	70%
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			30	31	32
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	BB (72,00)	BB (73,00)	BB (74,00)

Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka menerapkan strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program Program/Kegiatan dalam periode 2024-2026.

Tujuan dan sasaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dengan Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
**Tujuan dan sasaran Renstra dan Tujuan dan Sasaran RPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka**

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1.	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1 Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat
		1.2 Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat		
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol		

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program.
2. Akurasi Data pendukung perencanaan pembangunan masih sangat lemah.
3. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah.
5. Proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik belum terjalin sinergisitas.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran.
7. Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor sering ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.
8. Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah.
9. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
10. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.
11. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan.

4.1.b Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Umum tidak memiliki Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading berisi Tujuan, Sasaran, Outcame, Output, Indikator serta Target Renstra 2024-2026 sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

POHON KINERJA/CASCADINGBADAN KESBANGPOL

(Renstra 2024-2026)

TUJUAN RPD

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN RPD

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN RPD

Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN RENSTRA BANKESBANGPOL

Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR TUJUAN RENSTRA

Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

SASARAN STRATEGIS RENSTRA BANKESBANGPOL

Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat

Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RENSTRA BANKESBANGPOL

Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi

Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada



LOGICAL FRAMEWORK

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah

Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat daerah

Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi baik

Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah

Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat daerah

1. Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah
2. Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dlm LHP-BPK RI

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Layanan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah

Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah

Meningkatnya pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja

Persentase Penambahan Aset Perangkat Daerah

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai

Persentase Pegawai yang mengenakan Atribut Lengkap

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependidikan dan Pelatihan

Persentase pegawai yang mendapatkan Layanan Kependidikan dan Pelatihan

Meningkatnya Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar
2. Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan

Tersedianya Mebel

Jumlah Paket Mebel yang disediakan

Tersedianya Kendaraan Dinas

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan

Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN STRATEGIS

Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat

Indikator Sasaran Strategis : Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya

Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial

Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan

Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Idiologi Pancasila dan Karakter

Meningkatnya Koordinasi terhadap Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter

Meningkatnya Pembinaan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter

Meningkatnya Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman

Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Persentase Organisasi kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi

Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan

Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan

Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan

Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah

Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua Aspek Bermasyarakat,

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan

Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,

Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan

Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN RPD

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat

Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik

Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan

Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun

Persentase Ormas yang aktif

SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol

Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol

Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula

Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya me

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan

Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan diawasi

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan salah satu unsur perencanaan stratejik yang sangat diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Peningkatan Ketahanan sosial dan budaya masyarakat.
3. Peningkatan pendidikan politik masyarakat Peningkatan kewaspadaan. Penanganan konflik social.
4. Peningkatan pembinaan Organisasi kemasyarakatan .
5. Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan implementasi wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat
2. Peningkatan pembangunan karakter bangsa melalui gerakan revolusi mental.
3. Penguatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
4. Penguatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba

5. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan kerukunan beragama
6. Fasilitasi Forum kemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi deteksi cegah dini.
7. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
8. Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan
9. Optimalisasi fungsi FORKOPIMDA
10. Peningkatan pemantauan dan pendataan WNA/Orang asing di Kabupaten Bangka
11. Pemetaan wilayah rawan kemandirian dan ketertiban.
12. Penguatan kerjasama dan jejaring dengan instansi terkait dalam mewujudkan kenyamanan dan ketertian masyarakat.
13. Penguatan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat
14. Penguatan kualitas SDM Organisasi Politik
15. Meningkatkan pengawasan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)
16. Penguatan kualitas Sumber daya manusia Organisasi Masyarakat.
17. Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel.
18. Penguatan Kompetensi pegawai.
19. Penyediaan Sarana dan Prasarana kerja.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD 2024-2026 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Sasaran RPD 2024-2026 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat									
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan			
1.	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	1.1	Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.1	Penguatan implementasi wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat		
						1.2	Peningkatan pembangunan karakter bangsa melalui gerakan revolusi mental.		
						1.3	Penguatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		
						1.2	Peningkatan Ketahanan sosial dan budaya masyarakat	1.1	Penguatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba
								1.2	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan kerukunan beragama
								1.3	Peningkatan kewaspadaan Penanganan konflik sosial
				1.3	Peningkatan kewaspadaan Penanganan konflik sosial	1.1	Fasilitasi Forum kemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi deteksi cegah dini.		
						1.2	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		
						1.3	Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan		
						1.4	Optimalisasi fungsi FORKOPIMDA		
1.5	Peningkatan pemantauan dan pendataan WNA/Orang asing di Kabupaten Bangka								
1.6	Pemetaan wilayah rawan keamanan dan ketertiban.								

						1.7	Penguatan kerjasama dan jejaring dengan instansi terkait dalam mewujudkan kenyamanan dan ketertian masyarakat.
		1.2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat	1.1	Peningkatan pendidikan politik masyarakat	1.1	Penguatan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat
						1.2	Penguatan Pemahaman dan Kesadaran Politik Pemilih Pemula bagi Generasi Muda
						1.3	Peningkatan fungsi parpol dan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
				1.2	Peningkatan pembinaan Organisasi kemasyarakatan	1.1	Meningkatkan pengawasan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)
						1.2	Penguatan kualitas Sumber daya manusia Organisasi Masyarakat.
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka	1.1	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah	1.1	Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel.
						1.2	Penguatan Kompetensi pegawai
						1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana kerja

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Periode 2024-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah Program dan Kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026. Adapun uraian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sasaran Program yang ingin di capai adalah : Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah:

Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Indikator Kegiatan :

- a. Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan

- c. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan Sasaran Program yang ingin di capai adalah : Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat. Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah:
 1. Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik
 2. Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik.

Melalui Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Indikator Kegiatan yaitu

- a. Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol
 - b. Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sasaran Proram yang ingin di capai yaitu Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat.

Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah: Persentase Ormas yang aktif. Melalui Kegiatan :

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator Kegiatan yaitu : Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan diawasi

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sasaran Proram yang ingin di capai yaitu Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya.

Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah: Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan Indikator Kegiatan Yaitu :

- a. Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan
 - b. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan sasaran Proram yang ingin di capai yaitu Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial.
Adapun indikator kinerja keberhasilan program ini adalah Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial melalui kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Indikator Kegiatan yaitu :
 - a. Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan.
 - b. Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan.
 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran Proram yang ingin di capai yaitu
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan Kesbangpol
 - b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah
 - d. Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Keberhasilan Program Ini adalah

- a. Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol
- b. Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol
- c. Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI
- d. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
- e. Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah
- f. Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik

Melalui Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan Yaitu
 - Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar
 - Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar

Dengan Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Target 15 Dokumen di Periode Akhir Renstra
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Target 24 Dokumen di akhir periode akhir Renstra.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan yaitu Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI dengan target 0% dengan Sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Target 30 ASN.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan Target 36 Dokumen di akhir periode Renstra.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan Target 126 Laporan di akhir periode renstra.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan

- Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap
 - Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian
 - Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Dengan Sub Kegiatan :
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan Target 3 Paket di akhir periode Renstra.
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan Target 36 Dokumen di akhir periode Renstra.
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target 30 pegawai ASN di akhir periode Renstra.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah dengan sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Target 36 Laporan di akhir periode Renstra.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan Target 36 Dokumen di akhir periode Renstra.
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan Target 36 Dokumen di akhir periode Renstra.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator kegiatan Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Target 36 Laporan di akhir Periode Renstra.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 36 Laporan di akhir periode Renstra.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 36 Laporan di akhir periode Renstra.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kegiatan Persentase penambahan aset perangkat daerah dengan sub kegiatan :
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan target 3 Paket di akhir periode Renstra
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Target 33 Unit di akhir periode Renstra.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator Kegiatan Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan sub Kegiatan :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 2 unit Mobil 5 unit motor.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Target 20 unit di akhir periode Renstra.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 1 unit

Dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, program ,kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 setelah dapat dilihat pada tabel VI.1 berikut :

Kabupaten Bangka

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum								Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan di bagi Jumlah Stabilitas ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di kali seratus persen		100%	63,080,981,380.00	100%	4,282,523,818.00	100%	5,107,110,555.00	100%	72,470,615,753.00		Kab. Bangka
Sasaran Strategis 1	Menurunkan Potensi Konflik Sosial di Masyarakat							Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	Jumlah Potensi Konflik yang terjadi pada tahun berjalan di bagi jumlah potensi konflik tahun lalu di kali seratus persen	80.00%	80.00%	1,580,000,000.00	75.00%	1,619,500,000.00	70.00%	1,659,987,500.00	70.00%	4,859,487,500.00	Bankes bangpo l	Kab. Bangka
Sasaran Program 1	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	01	02				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	80.00%	80.00%	1,580,000,000.00	90.00%	1,619,500,000.00	100%	1,659,987,500.00	100%	4,859,487,500.00	Bankes bangpo l	Kab. Bangka
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Idiologi Pancasila dan Karakter	8	01	02	2	1.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	na	100%	1,580,000,000.00	100%	1,619,500,000.00	100%	1,659,987,500.00	100%	4,859,487,500.00	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekono	Kab. Bangka

	Kebangsaan								persen										mi, Sosial, Budaya, Agama		
	Meningkatnya Koordinasi terhadap Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan	Jumlah Peserta yang mengikuti koordinasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dibagi target yang direncanakan di kali seratus persen	na	100%		100%		100%					
	Meningkatnya Pembinaan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah ormas yang dibina tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dibagi jumlah seluruh ormas di kali seratus persen	na	33.33%		33.33%		33.33%		100%			
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8	01	02	2	1.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	na	60 Orang (30 Peserta Paskibrak a TK. Kabupate n Bangka, 30 Orang Duta Pancasila)	1,300,000,000.00	60 Orang (30 Peserta Paskibrak a TK. Kabupate n Bangka, 30 Orang Duta Pancasila)	1,332,500,000.00	60 Orang (30 Peserta Paskibrak a TK. Kabupate n Bangka, 30 Orang Duta Pancasila)	1,365,812,500.00	180 Orang (90 Peserta Paskibrak a TK. Kabupate n Bangka, 90 Orang Duta Pancasila)	3,998,312,500.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Sungailiat

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8	01	02	2	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		180 Orang (60 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 60 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 60 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (90 orang laki-laki dan 90 Orang Perempuan)	180,000,000.00	180 Orang (60 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 60 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 60 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (90 orang laki-laki dan 90 Orang Perempuan)	184,500,000.00	180 Orang (60 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 60 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 60 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (90 orang laki-laki dan 90 Orang Perempuan)	189,112,500.00	540 Orang (180 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 180 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 180 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (270 orang laki-laki dan 270 Orang Perempuan)	553,612,500.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Sungailiat
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8	01	02	2	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun pada tahun berkenaan	1 Laporan	1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	40,000,000.00	1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	41,000,000.00	1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	42,025,000.00	3 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	123,025,000.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	8	01	02	2	1.01	06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga yang disusun pada tahun berkenaan	-	1 Dokumen (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	60,000,000.00	1 Dokumen (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	61,500,000.00	1 Dokumen (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	63,037,500.00	3 Dokumen (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	184,537,500.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	

	Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara							dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara												
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat							Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam pemilukada dibagi seluruh jumlah mata pilih di kali seratus persen	62.22	70.00	61,500,981,380.00	70.00	2,663,023,818.00	70.00	3,447,123,055.00	70.00	67,611,128,253.00	Bankes bangpo l	Kabupaten Bangka	
Sasaran Program 2	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	8	01	03				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	Jumlah Parpol yang mendapatkan pembinaan politik/jumlah parpol mendapatkan Kursi di DPRD x 100 %	100%	100%	59,735,981,380.00	100%	853,898,818.00	100%	1,592,769,930.00	100.00	62,182,650,128.00	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Kab. Bangka
								Persentase pemilih pemula disatuan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah pemilih pemula di satuan pendidikan menengah yang telah mendapatkan pendidikan politik dibagi jumlah seluruh pemilih pemula di satuan pendidikan dikali 100 persen		35.00%		67.00%		98.00%		98.00%				

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	8	01	03	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	Jumlah parpol diverifikasi bantuan hibah dibagi jumlah parpol yang mendapatkan kursi di DPRD dikali 100 persen	100.00	100.00	59,735,981,380.00	100.00	853,898,818.00	100.00	1,592,769,930.00	100.00	62,182,650,128.00	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Kab. Bangka
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pemula								Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatkan Pendidikan politik	Jumlah satuan pendidikan menengah yang siswanya telah mendapatkan pendidikan politik dibagi seluruh satuan pendidikan menengah dikali 100 persen		36.00%		68.00%		100%		100%			
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	8	01	03	2	01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di		207.440 Orang (72 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota parpol, 635 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula)	59,435,981,380.00	632 Orang (72 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota parpol, 560 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula)	798,898,818.00	632 Orang (72 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota parpol, 560 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula)	1,532,269,930.00	208.704 Orang (216 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Anggota parpol, 1755 Orang Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula)	61,767,150,128.00	Sub Bidang Politik Dalam Negeri	Kab. Bangka

	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah		orang Pemilih pada PEMILU)					orang Pemilih pada PEMILU)					
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8	01	03	2	01	05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenan	-	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	300,000,000.00	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	55,000,000.00	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	60,500,000.00	3 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)	415,500,000.00	Sub Bidang Politik Dalam Negeri	
Sasaran Program 3	Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	8	01	04				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif	Jumlah ormas yang aktif dibagi jumlah ormas yang terdaftar di kali 100 persen	100.00	100.00	120,000,000.00	100.00	123,000,000.00	100.00	126,075,000.00	100.00	369,075,000.00	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bangka
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyara	8	01	04	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdaya	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibangun dan diawasi	Jumlah ormas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah ormas yang aktif dikali 100 persen	65.00	33.33	120,000,000.00	33.33	123,000,000.00	33.33	126,075,000.00	100.00	369,075,000.00	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi	Kab. Bangka

	katan							an dan Pengawasan Organisasi Masyarakat										asi Kemasyarakatan			
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8	01	04	2	01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		72 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	60,000,000.00	72 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	61,500,000.00	72 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	63,037,500	216 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	184,537,500.00	Sub Bidang Organisasi Masyarakat	Kab. Bangka
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8	01	04	2	01	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing Lainnya yang disusun pada tahun berkenaan	5 LNL	1 Laporan (60 LNL)	60,000,000.00	1 Laporan (60 LNL)	61,500,000.00	1 Laporan (60 LNL)	63,037,500.00	3 Laporan (180 LNL)	184,537,500.00	Sub Bidang Organisasi Masyarakat	Kab. Bangka
Sasaran Program 4	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	8	01	05				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terealisasi dibagi target yang direncanakan di kali 100 persen	100.00	100.00	1,150,000,000.00	100.00	1,178,750,000.00	100.00	1,208,218,750.00	100.00	3,536,968,750.00	Bankes bangpo l	Kab. Bangka
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8	01	05	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang	Jumlah kebijakan stabilitas ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dihasilkan dibagi jumlah kebijakan	100.00	100.00	1,150,000,000.00	100.00	1,178,750,000.00	100.00	1,208,218,750.00	100.00	3,536,968,750.00	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan	Kab. Bangka

								Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	dihasilkan	yang direncanakan di kali 100 persen									dan Ketaha nan Ekono mi, Sosial, Budaya , Agama		
	Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah ormas yang dibina tentang kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dibagi jumlah seluruh ormas di kali 100 persen			33.33		33.33		33.33		100.00		
	Tersusunnya Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgun aan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	1.01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	11 Dokumen (1 Perda/Pe rbub/SK, 10 Pembentu kan Desa Bersinar/ Kelompok Kerja)	140,000,000.0 0	11 Dokumen (1 Perda/Pe rbub/SK, 10 Pembentu kan Desa Bersinar/ Kelompok Kerja)	143,500,00 0.00	11 Dokumen (1 Perda/Pe rbub/SK, 10 Pembentu kan Desa Bersinar/ Kelompok Kerja)	147,087,50 0	33 Dokumen (3Perda/ Perbub/S K, 30 Pembentu kan Desa Bersinar/ Kelompok Kerja)	430,587,50 0.00	Sub Bidang Ketahan an Ekonom i, Sosial, Budaya, Agama	Kab. Bang ka

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	1.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Orang (20 Orang Laki-laki dan 20 Orang Perempuan)	1334 orang (40 Orang Peserta Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, 24 orang Satgas Anti Narkotika, 40 Orang Peserta Sosialisasi P4GN, 1000 Orang Peserta Rencana Aksi Daerah (RAD)/Tesis Uruin bagi Pegawai Kab. Bangka, 80 Orang Tim Terpadu P4GN TK. Kecamatan), 150 Peserta Penyuluh an/Bimtek P4GN bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat at (667 orang laki-laki dan 667 orang Perempuan)	910,000,000.00	1334 orang (40 Orang Peserta Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, 24 orang Satgas Anti Narkotika, 40 Orang Peserta Sosialisasi P4GN, 1000 Orang Peserta Rencana Aksi Daerah (RAD)/Tesis Uruin bagi Pegawai Kab. Bangka, 80 Orang Tim Terpadu P4GN TK. Kecamatan), 150 Peserta Penyuluh an/Bimtek P4GN bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat at (667 orang laki-laki dan 667 orang Perempuan)	932,750,000.00	1334 orang (40 Orang Peserta Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, 24 orang Satgas Anti Narkotika, 40 Orang Peserta Sosialisasi P4GN, 1000 Orang Peserta Rencana Aksi Daerah (RAD)/Tesis Uruin bagi Pegawai Kab. Bangka, 80 Orang Tim Terpadu P4GN TK. Kecamatan), 150 Peserta Penyuluh an/Bimtek P4GN bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat at (667 orang laki-laki dan 667 orang Perempuan)	956,068,750	4002 orang (120 Orang Peserta Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, 72 orang Satgas Anti Narkotika, 120 Orang Peserta Sosialisasi P4GN, 3000 Orang Peserta Rencana Aksi Daerah (RAD)/Tesis Uruin bagi Pegawai Kab. Bangka, 240 Orang Tim Terpadu P4GN TK. Kecamatan), 450 Peserta Penyuluh an/Bimtek P4GN bagi pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat at (667 orang laki-laki dan 667 orang Perempuan)	2,798,818,750.00	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kab. Bangka
---	---	----	----	---	------	----	--	---	---	--	---	----------------	---	----------------	---	-------------	--	------------------	---	-------------

	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	1.01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun pada tahun berkenan		3 Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	100,000,000.00	3 Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	102,500,000.00	3 Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	105,062,500.00	9 Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	307,562,500.00	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kab. Bangka
Sasaran Program 5	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial	8	01	06				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah penanganan konflik sosial yang terjadi dibagi seluruh kejadian konflik yang terjadi dikali 100 persen	80.00	100.00	495,000,000.00	100.00	507,375,000.00	100.00	520,059,375.00	100.00	1,522,434,375.00	Bankesbangpol	Kab. Bangka
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8	01	06	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	Jumlah kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang selesai dilakukan dibagi jumlah kebijakan yang direncanakan dikali 100 persen	80.00	100.00	495,000,000.00	100.00	507,375,000.00	100.00	520,059,375.00	100.00	1,522,434,375.00	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kab. Bangka
	Meningkatnya Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100 persen		12.35		12.35		12.35		37.04			

	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	01	06	2	01	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan Antar Negara,	-	100 Orang (50 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 150 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	150,000,000.00	100 Orang (50 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 150 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	153,750,000.00	100 Orang (50 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 150 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	157,593,750.00	300 Orang (150 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 150 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	461,343,750.00	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Sungailiat
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	01	06	2	01	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	50 Orang Peserta Penanganan Konflik	75,000,000.00	50 Orang Peserta Penanganan Konflik	76,875,000.00	50 Orang Peserta Penanganan Konflik	78,796,875.00	150 Orang Peserta Penanganan Konflik	230,671,875.00	Sub Bidang Penanganan Konflik	Kab. Bangka
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	8	01	06	2	01	05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	1 Laporan	3 Laporan (2 Laporan Pemanta	150,000,000.00	3 Laporan (2 Laporan Pemanta	153,750,000.00	3 Laporan (2 Laporan Pemanta	157,593,750.00	9 Laporan (6 Laporan Pemanta	461,343,750.00	Sub Bidang Penanganan Konflik	Kab. Bangka

	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		uan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)		uan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)		uan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)		uan Orang Asing, 3 Laporan Pemetaan Data Rawan)					
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8	01	06	2	01	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	123,000,000.00	1 Dokumen	126,075,000.00	3 Dokumen	369,075,000.00	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Kab. Bangka		
MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH								Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			30.00		5,223,720,620.00	31.00		5,746,092,682.00	32.00		6,320,701,945.00	32.00		17,290,515,247.00	Kab. Bangka
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	BB (71,51)	BB (72,00)	5,223,720,620.00	BB (73,00)	5,746,092,682.00	BB (74,00)	6,320,701,945.00	BB (74,00)	17,290,515,247.00	Bankes bangpo l	Kab. Bangka			
Sasaran Progam ke-1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan	8	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol	26.3	24.57	25.00	44,349,800.00	25.50	48,784,780.00	26.00	53,663,258.00	26.00	146,797,838.00	Bankes bangpo l	Sungailiat		

	Kesbangpol																				
								<i>Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol</i>	9.88	10.78	11.00	22,380,000.00	11.25	24,618,000.00	12.00	27,079,800.00	12.00	74,077,800.00	Bankesbangpol	Sungailiat	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	8	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar</i>	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen	100%	100%	44,349,800.00	100%	48,784,780.00	100%	53,663,258.00	100%	146,797,838.00	Sekretariat	Sungailiat
									<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen	100%	100%	22,380,000.00	100%	24,618,000.00	100%	27,079,800.00	100%	74,077,800.00	Sekretariat	Sungailiat
	<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	8	01	01	2	01	01	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%</i>	5 Dok	8 Dokumen	44,349,800.00	8 Dokumen	48,784,780.00	8 Dokumen	53,663,258.00	24 Dokumen	146,797,838.00	<i>Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan</i>	<i>Sungailiat</i>

	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%	19 Lap	12 Laporan	22,380,000.00	12 Laporan	24,618,000.00	12 Laporan	27,079,800.00	36 Laporan	74,077,800.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sungailiat
Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan BPK dalam LHP BPK-RI x 100%	0%	0%	3,384,706,320.00	0%	3,723,176,952.00	0%	4,095,494,647.00	0%	11,203,377,919.00	Bankesbangpo	Sungailiat
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang harus disusun oleh Perangkat Daerah x 100%	100%	100%	3,384,706,320	100%	3,723,176,952.00	100%	4,095,494,647.00	100%	11,203,377,919.00	Sekretariat	Sungailiat
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	8	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang menerima gaji dan tunjangan pada tahun berkenaan	23 Orang/14 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	23 Orang/14 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	3,312,206,320.00	23 Orang/14 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	3,643,426,952.00	23 Orang/14 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	4,007,769,647.00	23 Orang/42 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	10,963,402,919.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sungailiat
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	01	01	2	02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun dalam 1 Tahun berkenaan		12 Dokumen	35,000,000.00	12 Dokumen	38,500,000.00	12 Dokumen	42,350,000.00	36 Dokumen	115,850,000.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sungailiat

	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8	01	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun dalam 1 tahun berkenaan		42 Laporan	37,500,000.00	42 Laporan	41,250,000.00	42 Laporan	45,375,000.00	126 Laporan	124,125,000.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sungailiat
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Penguruan IP ASN Perangkat Daerah oleh BKPSDMD	64,76	64.78	139,950,000.00	64.80	153,945,000.00	64.82	169,339,500.00	64.82	463,234,500.00	Bankesbangpo	Sungailiat
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	8	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengenakan atribut lengkap dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	100%	100%	139,950,000.00	100%	153,945,000.00	100%	169,339,500.00	100%	463,234,500.00	Sekretariat	Sungailiat
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian								Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat	Sungailiat
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%		43.48%		43,48%		43,48%		43,48%		Sekretariat	Sungailiat
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	01	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan pada tahun berkenaan	1 Paket	1 Paket	44,950,000.00	1 Paket	49,445,000.00	1 Paket	54,389,500.00	3 Paket	148,784,500.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat

	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8	01	01	2	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun pada tahun berkenaan	-	11 Dokumen	20,000,000.00	11 Dokumen	22,000,000.00	11 Dokumen	24,200,000.00	33 Dokumen	66,200,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8	01	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan		10 orang (5 laki-laki & 5 perempuan)	75,000,000.00	10 orang (5 laki-laki & 5 perempuan)	82,500,000.00	10 orang (5 laki-laki & 5 perempuan)	90,750,000.00	30 orang (15 laki-laki & 15 perempuan)	248,250,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
Sasaran Program ke-4	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah								Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Nilai persepsi berdasarkan Hasil survey internal terhadap pelayanan Bidang Sekretariat Perangkat Daerah (dari 1 sampai 4)		3.00	683,240,500.00	3.10	869,814,550.00	3.15	956,796,000.00	3.15	2,617,351,050.00	Ban Kes Bang pol	Sungailiat
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	8	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi umum di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan administrasi umum yang harus dilaksanakan perangkat daerah (layanan fasilitasi rapat-rapat koordinasi, layanan penataan arsip dan layanan sistem SPBE) x 100%	100%	100%	258,240,500.00	100%	284,064,550.00	100%	312,471,000.00	100%	854,776,050.00	Sekretariat	Sungailiat
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi yang di fasilitasi SKPD per bulan Laporan Perjalanan	36 Laporan	12 Laporan	200,000,000.00	12 Laporan	220,000,000.00	12 Laporan	242,000,000.00	36 Laporan	662,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat

	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	01	01	2	06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang disusun pada tahun berkenaan	36 Dokumen	12 Dokumen	29,120,250.00	12 Dokumen	32,032,275.00	12 Dokumen	35,235,500.00	36 Dokumen	96,388,025.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	01	01	2	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang disusun pada tahun berkenaan	36 Dokumen	12 Dokumen	29,120,250.00	12 Dokumen	32,032,275.00	12 Dokumen	35,235,500.00	36 Dokumen	96,388,025.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	8	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan penunjang yang harus dilaksanakan perangkat daerah (layanan surat menyurat, layanan jasa komunikasi, air dan listrik dan layanan umum kantor) x 100%	100%	100%	425,000,000.00	100%	467,500,000.00	100%	514,250,000.00	100%	1,406,750,000.00	Sekretariat	Sungailiat
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan berisi rekap surat menyurat (surat masuk dan surat keluar) yang disusun perbulan	12 Bulan	12 Laporan	300,000,000.00	12 Laporan	330,000,000.00	12 Laporan	363,000,000.00	36 Laporan	993,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Layanan yang disusun terkait penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Laporan	45,000,000.00	12 Laporan	49,500,000.00	12 Laporan	54,450,000.00	36 Laporan	148,950,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Layanan yang disusun terkait Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	88,000,000.00	12 Laporan	96,800,000.00	36 Laporan	264,800,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat

Sasaran Program ke-5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah								Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh Barang Milik Daerah dlm inventaris Perangkat Daerah x 100%	100%	100%	949,094,000.00	100%	1,044,003,400.00	100%	1,148,403,740.00	100%	3,141,501,140.00	Bankes bangpo l	Sung ailia t
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	8	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah yang ada pada inventaris perangkat daerah x 100%	40%	27.08%	532,500,000.00	21.31%	585,750,000.00	17.57%	644,325,000.00	65.96%	1,762,575,000.00	Sekretariat	Sung ailia t
	Tersedianya Mebel	8	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit Mebel yang diadakan pada tahun berkenaan	-	1 Paket	100,000,000.00	1 Paket	110,000,000.00	1 Paket	121,000,000.00	3 Paket	331,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sung ailia t
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan pada tahun berkenaan	-	11 Unit	125,000,000.00	11 Unit	137,500,000.00	11 Unit	151,250,000.00	33 Unit	413,750,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sung ailia t
	Tersedianya Kendaraan Dinas	8	01	01	2	07	07	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang diadakan pada tahun berkenaan	-	1 unit	307,500,000.00	1 unit	338,250,000.00	1 unit	372,075,000.00	3 unit	1,017,825,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sung ailia t
Sasaran Kegiatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	8	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah x 100%	60.00	58.33%	416,594,000.00	45.90%	458,253,400.00	37.84%	504,078,740.00	142.07%	1,378,926,140.00	Sekretariat	Sung ailia t
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	8	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unut Kendaraan Roda empat, 5 Unut Kendaraan Roda dua	2 Unut Kendaraan Roda empat, 5 Unut Kendaraan Roda dua	91,594,000.00	2 Unut Kendaraan Roda empat, 5 Unut Kendaraan Roda dua	100,753,400.00	2 Unut Kendaraan Roda empat, 5 Unut Kendaraan Roda dua	110,828,740.00	2 Unut Mobil dan 5 Unut Motor	303,176,140.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sung ailia t

Operasional atau Lapangan							Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	pada tahun berkenaan											
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang pelihara pada tahun berkenaan	20 Unit	20 Unit	25,000,000.00	20 Unit	27,500,000.00	20 Unit	30,250,000.00	20 Unit	82,750,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun berkenaan	1 Unit	1 Unit	300,000,000.00	1 Unit	330,000,000.00	1 Unit	363,000,000.00	1 Unit	993,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
								Jumlah				68,304,702,000.00		10,028,616,500.00		11,427,812,500.00		89,761,131,000.00		

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 Perubahan
Kabupaten Bangka**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri Nomor : 050-5889	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2022	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum								Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan di bagi Jumlah Stabilitas ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di kali seratus persen		100%	63,080,981,380.00	100%	4,282,523,818.00	100%	5,107,110,555.00	100%	72,470,615,753.00		Kab. Bangka
Sasaran Strategis 1	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat							Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	Jumlah Potensi Konflik yang terjadi pada tahun berjalan di bagi jumlah potensi konflik tahun lalu di kali seratus persen	80.00%	80.00%	1,580,000,000.00	75.00%	1,619,500,000.00	70.00%	1,659,987,500.00	70.00%	4,859,487,500.00	Banquesbangpol	Kab. Bangka
Sasaran Program 1	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	01	02				Persentase Unsur Masyarakat yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Unsur Masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dibagi target yang direncanakan di kali seratus persen	80.00%	80.00%	1,580,000,000.00	90.00%	1,619,500,000.00	100%	1,659,987,500.00	100%	4,859,487,500.00	Banquesbangpol	Kab. Bangka

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Peran Serta Generasi Muda dalam Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8	01	02	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Generasi Muda yang memiliki pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelajar yang mendapatkan pembinaan, pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dibagi target yang direncanakan di kali seratus persen	na	100%	1,580,000,000.00	100%	1,619,500,000.00	100%	1,659,987,500.00	100%	4,859,487,500.00	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Ka. b. Bangsa
	Meningkatnya Koordinasi terhadap Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								Persentase Koordinasi Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilakukan	Jumlah Peserta yang mengikuti koordinasi ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dibagi target yang direncanakan di kali seratus persen	na	100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya Pembinaan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang memperoleh Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah ormas yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dibagi jumlah seluruh ormas di kali seratus persen	na	33.33%		33.33%		33.33%		100%			
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8	01	02	2	01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	na	750 Orang (Pegawai ASN dan Non ASN yang Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional)	55,000,000.00	750 Orang (Pegawai ASN dan Non ASN yang Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional)	56,375,000.00	750 Orang (Pegawai ASN dan Non ASN yang Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional)	57,784,375.00	2250 Orang (Pegawai ASN dan Non ASN yang Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional)	169,159,375.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Sun gail iat

	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8	01	02	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		180 Orang (60 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 60 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 60 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (90 orang laki-laki dan 90 Orang Perempuan)	50,000,000.00	180 Orang (60 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 60 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 60 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (90 orang laki-laki dan 90 Orang Perempuan)	51,250,000.00	180 Orang (60 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 60 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 60 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (90 orang laki-laki dan 90 Orang Perempuan)	52,531,250.00	540 Orang (180 Orang Kegiatan Seminar Wawasan Kebangsaan, 180 Orang Kegiatan Forum Pembauran, 180 Orang Peserta Pelatihan Revolusi Mental) (270 orang laki-laki dan 270 Orang Perempuan)	153,781,250.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Sun gail at
	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun berkenan	1 Laporan	1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	40,000,000.00	1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	41,000,000.00	1 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	42,025,000.00	3 Laporan (Monitoring Revolusi Mental)	123,025,000.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	

	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	8	01	02	2	01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga yang disusun pada tahun berkenaan	-	30 Keluarga (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	40,000,000.00	30 Keluarga (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	41,000,000.00	30 Keluarga (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	42,025,000.00	90 Keluarga (Sosialisasi Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Ideologi Pancasila dalam Keluarga)	123,025,000.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	8	01	02	2	01	0007	Pembinaan Terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Pembinaan Purnapaskibraka	-	1 Dokumen (Sosialisasi Pembinaan aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka)	25,000,000.00	1 Dokumen (Sosialisasi Pembinaan aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka)	25,625,000.00	1 Dokumen (Sosialisasi Pembinaan aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka)	26,265,625.00	3 Dokumen (Sosialisasi Pembinaan aktivitas kepaskibrakan dan purnapaskibraka)	76,890,625.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	8	01	02	2	01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Jumlah Paskibraka yang terbentuk	-	30 Orang (Pembentukan Paskibraka)	1,300,000.00	30 Orang (Pembentukan Paskibraka)	1,332,500.00	30 Orang (Pembentukan Paskibraka)	1,365,812,500.00	90 Orang (Pembentukan Paskibraka)	3,998,312,500.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	8	01	02	2	01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Dokumen Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	1 Dokumen (Pembinaan Lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila)	25,000,000.00	1 Dokumen (Pembinaan Lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila)	25,625,000.00	1 Dokumen (Pembinaan Lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila)	26,265,625.00	3 Dokumen (Pembinaan Lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila)	76,890,625.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	

	Terlaksananya Penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	8	01	02	2	01	0010	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	1 Dokumen (Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila)	20,000,000.00	1 Dokumen (Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila)	20,500,000.00	1 Dokumen (Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila)	21,012,500.00	3 Dokumen (Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila)	61,512,500.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	Terbentuknya Purnapaskibraka duta pancasila	8	01	02	2	01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila yang terbentuk	-	30 Orang (Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila)	25,000,000.00	30 Orang (Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila)	25,625,000.00	30 Orang (Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila)	26,265,625.00	90 Orang (Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila)	76,890,625.00	Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat							Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam pemilukada dibagi seluruh jumlah mata pilih di kali seratus persen	62.22	70.00	61,500,981,380.00	70.00	2,663,023,818.00	70.00	3,447,123,055.00	70.00	67,611,128,253.00	Bankesbangpol	Kabupaten Bangka	
Sasaran Program 2	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	8	01	03				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang diberikan pembinaan politik	Jumlah Parpol yang mendapatkan pembinaan politik/jumlah parpol mendapatkan Kursi di DPRD x 100 %	100%	100%	59,735,981,380.00	100%	853,898,818.00	100%	1,592,769,930.00	100.00	62,182,650,128.00	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Kab. Bangka

								Persentase pemilih pemula disatukan pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah pemilih pemula di satuan pendidikan menengah yang telah mendapatkan pendidikan politik dibagi jumlah seluruh pemilih pemula di satuan pendidikan dikali 100 persen		35.00%		67.00%		98.00%		98.00%			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	8	01	03	2	01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol	Jumlah parpol diverifikasi bantuan hibah dibagi jumlah parpol yang mendapatkan kursi di DPRD dikali 100 persen	100.00	100.00	59,735,981,380.00	100.00	853,898,818.00	100.00	1,592,769,930.00	100.00	62,182,650,128.00	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Bangkaya

	Meningkatn ya Partisipasi Pemilih Pemula								Persentase Satuan Pendidikan Menengah yang siswanya mendapatka n Pendidikan politik	Jumlah satuan pendidikan menengah yang siswanya telah mendapatkan pendidikan politik dibagi seluruh satuan pendidikan menengah dikali 100 persen		36.00%		68.00%		100%		100%			
	Terlaksanan ya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8	01	03	2	01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		207.440 Orang (72 Orang Sosisalis asi Pendi kan Politik Bagi Anggota parpol, 635 Orang Sosisalis asi Pendi kan Politik Bagi Pemilih Pemula, 206.733 orang Pemilih pada PEMILU)	59,435,98 1,380.00	632 Orang (72 Orang Sosisalis asi Pendi kan Politik Bagi Anggota parpol, 560 Orang Sosisalis asi Pendi kan Politik Bagi Pemilih Pemula)	798,898,818. 00	632 Orang (72 Orang Sosisalis asi Pendi kan Politik Bagi Anggota parpol, 560 Orang Sosisalis asi Pendi kan Politik Bagi Pemilih Pemula)	1,532,269,9 30.00	208.704 Orang (216 Orang Sosisalis asi Pendi kan Politik Bagi Anggota parpol, 1755 Orang Sosisalis asi Pendi kan Politik Bagi Pemilih Pemula, 206.733 orang Pemilih pada PEMILU)	61,767,150, 128.00	Sub Bidang Politik Dalam Negeri	Kab . Ban gka

	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8	01	03	2	01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun pada tahun berkenan	-	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	300,000,000.00	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	55,000,000.00	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu dan Pilkada)	60,500,000.00	3 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)	415,500,000.00	Sub Bidang Politik Dalam Negeri	
Sasaran Program 3	Meningkatnya Peran Serta dan Fungsi Ormas dalam membangun masyarakat	8	01	04				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang aktif	Jumlah ormas yang aktif dibagi jumlah ormas yang terdaftar di kali 100 persen	100.00	100.00	120,000,000.00	100.00	123,000,000.00	100.00	126,075,000.00	100.00	369,075,000.00	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ka b. Bangsa
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	8	01	04	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibangun dan diawasi	Jumlah ormas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dibagi jumlah ormas yang aktif dikali 100 persen	65.00	33.33	120,000,000.00	33.33	123,000,000.00	33.33	126,075,000.00	100.00	369,075,000.00	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ka b. Bangsa

	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8	01	04	2	01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		72 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	60,000,000.00	72 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	61,500,000.00	72 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	63,037,500	216 Orang (Pembinaan Organisasi masyarakat)	184,537,500.00	Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.	Kab. Bangka
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8	01	04	2	01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya yang disusun pada tahun berkenaan	5 LNL	1 Laporan (60 LNL)	60,000,000.00	1 Laporan (60 LNL)	61,500,000.00	1 Laporan (60 LNL)	63,037,500.00	3 Laporan (180 LNL)	184,537,500.00	Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.	Kab. Bangka
Sasaran Program 4	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	8	01	05				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terealisasi dibagi target yang direncanakan di kali 100 persen	100.00	100.00	1,150,000,000.00	100.00	1,178,750,000.00	100.00	1,208,218,750.00	100.00	3,536,968,750.00	Bankesbangpol	Kab. Bangka
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8	01	05	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Kebijakan Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya yang dihasilkan	Jumlah kebijakan stabilitas ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dihasilkan dibagi jumlah kebijakan yang direncanakan di kali 100 persen	100.00	100.00	1,150,000,000.00	100.00	1,178,750,000.00	100.00	1,208,218,750.00	100.00	3,536,968,750.00	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kab. Bangka

	Meningkatn ya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								Persentase Organisasi Kemasyarak atan yang memperoleh Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah ormas yang dibina tentang kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dibagi jumlah seluruh ormas di kali 100 persen		33.33		33.33		33.33		100.00			
	Tersusunnya Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgun aan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	01	0002	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahguna aan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosail, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	11 Dokume n (1 Perda/P erubub/S K, 10 Pemben tukan Desa Bersinar / Kelomp ok Kerja)	140,000,0 00.00	11 Dokume n (1 Perda/P erubub/S K, 10 Pemben tukan Desa Bersinar / Kelomp ok Kerja)	143,500,000. 00	11 Dokume n (1 Perda/P erubub/S K, 10 Pemben tukan Desa Bersinar / Kelomp ok Kerja)	147,087,50 0	33 Dokume n (3Perda /Perubub /SK, 30 Pemben tukan Desa Bersinar / Kelomp ok Kerja)	430,587,50 0.00	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kab . Ban gka
	Terlaksanan ya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	1.01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Orang (20 Orang Laki-Laki dan 20 Orang Perempu an)	1334 orang (40 Orang Peserta Kegiata n Peningk atan Toleran si dan Kerukun an Dalam Kehidup an Beraga ma, 24 orang Satgas Anti Narkoti ka, 40 Orang Peserta	910,000,0 00.00	1334 orang (40 Orang Peserta Kegiata n Peningk atan Toleran si dan Kerukun an Dalam Kehidup an Beraga ma, 24 orang Satgas Anti Narkoti ka, 40 Orang Peserta	932,750,000. 00	1334 orang (40 Orang Peserta Kegiata n Peningk atan Toleran si dan Kerukun an Dalam Kehidup an Beraga ma, 24 orang Satgas Anti Narkoti ka, 40 Orang Peserta	956,068,75 0	4002 orang (120 Orang Peserta Kegiata n Peningk atan Toleran si dan Kerukun an Dalam Kehidup an Beraga ma, 72 orang Satgas Anti Narkoti ka, 120 Orang Peserta	2,798,818,7 50.00	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kab . Ban gka

	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8	01	05	2	1.01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun pada tahun berkenan		3	Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	100,000,000.00	3	Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	102,500,000.00	3	Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	105,062,500	9	Laporan (Evaluasi dan Monitoring Tk Kecamatan)	307,562,500.00	Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Kab . Bangka
Sasaran Program 5	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Konflik Sosial	8	01	06				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah penanganan konflik sosial yang terjadi dibagi seluruh kejadian konflik yang terjadi dikali 100 persen	80.00	100.00	495,000,000.00	100.00	507,375,000.00	100.00	520,059,375.00	100.00	1,522,434,375.00	Bankesbangpol	Kab. Bangka				
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8	01	06	2	01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kebijakan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	Jumlah kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang selesai dilakukan dibagi jumlah kebijakan yang direncanakan dikali 100 persen	80.00	100.00	495,000,000.00	100.00	507,375,000.00	100.00	520,059,375.00	100.00	1,522,434,375.00	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kab. Bangka				

	Meningkatnya Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							Persentase cakupan desa/kelurahan yang dilakukan Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial jumlah seluruh desa/kelurahan dikali 100 persen		12.35		12.35		12.35		37.04				
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	01	06	2	01	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	-	100 Orang (50 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 50 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	150,000,000.00	100 Orang (50 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 50 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	153,750,000.00	100 Orang (50 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 50 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	157,593,750.00	300 Orang (150 Orang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini, 150 Orang Peserta Sosialisasi Regulasi Kebijakan)	461,343,750.00	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Sungai

	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	01	06	2	01	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	50 Orang Peserta Penanganan Konflik	75,000,000.00	50 Orang Peserta Penanganan Konflik	76,875,000.00	50 Orang Peserta Penanganan Konflik	78,796,875.00	150 Orang Peserta Penanganan Konflik	230,671,875.00	Sub Bidang Penanganan Konflik	Kab . Bangka
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8	01	06	2	01	0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	3 Laporan (2 Laporan Pemantauan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)	150,000,000.00	3 Laporan (2 Laporan Pemantauan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)	153,750,000.00	3 Laporan (2 Laporan Pemantauan Orang Asing, 1 Laporan Pemetaan Data Rawan)	157,593,750.00	9 Laporan (6 Laporan Pemantauan Orang Asing, 3 Laporan Pemetaan Data Rawan)	461,343,750.00	Sub Bidang Penanganan Konflik	Kab . Bangka

	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8	01	06	2	01	0006	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	123,000,000.00	1 Dokumen	126,075,000.00	3 Dokumen	369,075,000.00	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Kab. Bangka
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH								Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			30.00		5,223,720,620.00	31.00	5,746,092,682.00	32.00	6,320,701,945.00	32.00	17,290,515,247.00		Kab. Bangka
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh APIP pada LHE AKIP Perangkat Daerah	BB (71,51)	BB (72,00)	5,223,720,620.00	BB (73,00)	5,746,092,682.00	BB (74,00)	6,320,701,945.00	BB (74,00)	17,290,515,247.00	Bankesbangpol	Kab. Bangka	
Sasaran Program ke-1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Badan Kesbangpol	8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai kinerja Perencanaan Badan Kesbangpol	26.3	24.57	25.00	44,349,800.00	25.50	48,784,780.00	26.00	53,663,258.00	26.00	146,797,838.00	Bankesbangpol	Sungailiat	
								Nilai Kinerja Pelaporan Badan Kesbangpol	9.88	10.78	11.00	22,380,000.00	11.25	24,618,000.00	12.00	27,079,800.00	12.00	74,077,800.00	Bankesbangpol	Sungailiat	
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	8	01	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen	100%	100%	44,349,800.00	100%	48,784,780.00	100%	53,663,258.00	100%	146,797,838.00	Sekretariat	Sungailiat	

									<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun perangkat daerah sesuai standar dibagi jumlah seluruh dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun perangkat daerah sesuai standar x 100 persen	100%	100%	22,380,000.00	100%	24,618,000.00	100%	27,079,800.00	100%	74,077,800.00	Sekretariat	Sungailiat
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen perencanaan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%	5 Dok	8 Dokumen	44,349,800.00	8 Dokumen	48,784,780.00	8 Dokumen	53,663,258.00	24 Dokumen	146,797,838.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sungailiat
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun pada tahun berkenaan dibagi jumlah semua dokumen pelaporan kinerja yang harus disusun pada tahun berkenaan x 100%	19 Lap	12 Laporan	22,380,000.00	12 Laporan	24,618,000.00	12 Laporan	27,079,800.00	36 Laporan	74,077,800.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sungailiat

Sasaran Program ke-2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan BPK dalam LHP BPK-RI x 100%	0%	0%	3,384,706,320.00	0%	3,723,176,952.00	0%	4,095,494,647.00	0%	11,203,377,919.00	Bankesba ngpol	Su ngailia t
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dibagi jumlah seluruh laporan keuangan yang harus disusun oleh Perangkat Daerah x 100%	100%	100%	3,384,706,320	100%	3,723,176,952.00	100%	4,095,494,647.00	100%	11,203,377,919.00	Sekretaria t	Su ngailia t
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	8	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang menerima gaji dan tunjangan pada tahun berkenaan	23 Orang/14 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	23 Orang/14 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	3,312,206,320.00	23 Orang/14 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	3,643,426,952.00	23 Orang/14 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	4,007,769,647.00	23 Orang/42 Bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	10,963,402,919.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sun gailiat
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	01	01	2	02	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun dalam 1 Tahun berkenaan	12 Dokumen	12 Dokumen	35,000,000.00	12 Dokumen	38,500,000.00	12 Dokumen	42,350,000.00	36 Dokumen	115,850,000.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sun gailiat

	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	01	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dalam 1 tahun berkenaan		42 Laporan	37,500,000.00	42 Laporan	41,250,000.00	42 Laporan	45,375,000.00	126 Laporan	124,125,000.00	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan	Sungailiat
Sasaran Program ke-3	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Hasil Penguruan IP ASN Perangkat Daerah oleh BKPSDMD	64,76	64.78	139,950,000.00	64.80	153,945,000.00	64.82	169,339,500.00	64.82	463,234,500.00	Banquesbangpol	Sungailiat
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	8	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap	Jumlah pegawai perangkat daerah yang mengenakan atribut lengkap dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	100%	100%	139,950,000.00	100%	153,945,000.00	100%	169,339,500.00	100%	463,234,500.00	Sekretariat	Sungailiat
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian								Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh pegawai perangkat daerah x 100%	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat	Sungailiat

Sasaran Kegiatan	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	8	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi umum di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan administrasi umum yang harus dilaksanakan perangkat daerah (layanan fasilitasi rapat-rapat koordinasi, layanan penataan arsip dan layanan sistem SPBE) x 100%	100%	100%	258,240,500.00	100%	284,064,550.00	100%	312,471,000.00	100%	854,776,050.00	Sekretariat	Sungailiat
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi yang di fasilitasi SKPD per bulan Laporan Perjalanan	36 Laporan	12 Laporan	200,000,000.00	12 Laporan	220,000,000.00	12 Laporan	242,000,000.00	36 Laporan	662,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	01	01	2	06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada tahun berkenaan	36 Dokumen	12 Dokumen	29,120,250.00	12 Dokumen	32,032,275.00	12 Dokumen	35,235,500.00	36 Dokumen	96,388,025.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	01	01	2	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun berkenaan	36 Dokumen	12 Dokumen	29,120,250.00	12 Dokumen	32,032,275.00	12 Dokumen	35,235,500.00	36 Dokumen	96,388,025.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat

Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	8	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang di perangkat daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan penunjang yang harus dilaksanakan perangkat daerah (layanan surat menyurat, layanan jasa komunikasi, air dan listrik dan layanan umum kantor) x 100%	100%	100%	425,000,000.00	100%	467,500,000.00	100%	514,250,000.00	100%	1,406,750,000.00	Sekretariat	Sungailiat
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan berisi rekap surat menyurat (surat masuk dan surat keluar) yang disusun perbulan	12 Bulan	12 Laporan	300,000,000.00	12 Laporan	330,000,000.00	12 Laporan	363,000,000.00	36 Laporan	993,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	Sungailiat
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Layanan yang disusun terkait penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Laporan	45,000,000.00	12 Laporan	49,500,000.00	12 Laporan	54,450,000.00	36 Laporan	148,950,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	Sungailiat
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Layanan yang disusun terkait Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	88,000,000.00	12 Laporan	96,800,000.00	36 Laporan	264,800,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	Sungailiat
Sasaran Program ke-5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah								Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh Barang Milik Daerah dlm inventaris Perangkat Daerah x 100%	100%	100%	949,094,000.00	100%	1,044,003,400.00	100%	1,148,403,740.00	100%	3,141,501,140.00	Bankesbangpol	Sungailiat

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	8	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang diadakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah yang ada pada inventaris perangkat daerah x 100%	40%	27.08%	532,500,000.00	21.31%	585,750,000.00	17.57%	644,325,000.00	65.96%	1,762,575,000.00	Sekretariat	Sungailiat
	Tersedianya Mebel	8	01	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit Mebel yang diadakan pada tahun berkenaan	-	1Unit	100,000,000.00	1Unit	110,000,000.00	1Unit	121,000,000.00	3 Unit	331,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8	01	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan pada tahun berkenaan	-	11 Unit	125,000,000.00	11 Unit	137,500,000.00	11 Unit	151,250,000.00	33 Unit	413,750,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
	Tersedianya Kendaraan Dinas	8	01	01	2	07	07	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan pada tahun berkenaan	-	1 unit	307,500,000.00	1 unit	338,250,000.00	1 unit	372,075,000.00	3 unit	1,017,825,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat
Sasaran Kegiatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	8	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara pada tahun berkenaan dibagi jumlah seluruh barang milik daerah x 100%	60.00	58.33%	416,594,000.00	45.90%	458,253,400.00	37.84%	504,078,740.00	142.07%	1,378,926,140.00	Sekretariat	Sungailiat
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan perangkat daerah yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berkenaan	2 Unut Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua	91,594,000.00	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua	100,753,400.00	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua	110,828,740.00	2 Unit Kendaraan Roda empat, 5 Uni Kendaraan Roda dua	303,176,140.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sungailiat

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang pelihara pada tahun berkenaan	20 Unit	20 Unit	25,000,000.00	20 Unit	27,500,000.00	20 Unit	30,250,000.00	20 Unit	82,750,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sun gail iat
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun berkenaan	1 Unit	1 Unit	300,000,000.00	1 Unit	330,000,000.00	1 Unit	363,000,000.00	1 Unit	993,000,000.00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sun gail iat
								Jumlah				68,304,702,000.00		10,028,616,500.00		11,427,812,500.00		89,761,131,000.00		

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 maka terjadi penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai upaya menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur dan mempertajam kembali tujuan, sasaran, indikator, serta program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada table 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kesbangpol Kabupaten Bangka
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis 2024-2026	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Menurunnya Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Potensi Konflik Sosial yang terjadi	80%	80%	75%	70%	70%
2.	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemiluk ada	62,22%	70%	70%	70%	70%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah	BB (71,51)	BB (72,00)	BB (73,00)	BB (74,00)	BB (74,00)

7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Umum tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK).

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka secara khusus dan kondisi, situasi dan potensi yang ada di Kabupaten Bangka pada umumnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangka 2024-2026. Hasil pelaksanaan dari renstra akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini disusun agar terjadi harmonisasi dan penyelarasan terhadap Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja serta menjadi penentu konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dengan adanya Renstra OPD bertujuan agar OPD memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp (0717) 93296
E-mail : [Kesbangpol @ go.id](mailto:Kesbangpol@go.id)/Website : www. Bangka go.id

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : 188.45/ 10 /BANKESBANGPOL/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024 -2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Staretgis 2023-2026, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Staregis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024 -2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 55), Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang – undang Darurat

- Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) , tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka;
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Strategis tahun 2024-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : 06 Desember 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangka di Sungailiat;
2. Kepala Bappeda Kab. Bangka di Sungailiat;
3. Kepala DPPKAD Kab. Bangka di Sungailiat;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Bangka di Sungailiat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BANGKA
 NOMOR : 188.45/ 10 /BANKESBANGPOL/2022
 TANGGAL : 06 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Ka. Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Wakil Ketua
4.	Ka. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan	Wakil Ketua
5.	Ka. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Wakil Ketua
6.	Sub Koordinator Program Anggaran dan Keuangan (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)	Sekretaris
7.	Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Analisis Kebijakan)	Anggota
9.	Sub Koordinator Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama (Analisis Kebijakan)	Anggota
10.	Sub Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri (Analisis Kebijakan)	Anggota
11.	Sub Koordinator Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Analisis Kebijakan)	Anggota
12.	Sub Koordinator Bidang Kewaspadaan Nasional (Analisis Kebijakan)	Anggota
13.	Sub Koordinator Bidang Penanganan Konflik (Analisis Kebijakan)	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
 pada tanggal : 06 Desember 2022


**PIL.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA**
Drs. TEDDY SUDARSONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660819 199603 1 002

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renstra PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Rancangan Renstra PD	6 Desember 2022- Februari 2023	
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda	6-8 Februari 2023	
4	Penyusunan draft Ranhir Renstra PD	9 Februari-10 Maret 2023	
5	Penetapan RPD Kab. Bangka Tahun 2024-2026	10 Maret 2023	
6	Verifikasi dan Penyempurnaan Draft Ranhir Renstra PD	10-14 Maret 2023	
7	Penetapan Ranhir Renstra PD	15 Maret 2023	
8	Reviu Ranhir Renstra PD oleh APIP	16-31 Maret 2023	
9	Pengajuan Rancangan Perkada Renstra PD	3 April 2023	
10	Harmonisasi Rancangan Perkada	4-10 April 2023	
11	Penetapan Perkada tentang Renstra PD	10 April 2023	